

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas terkait penyajian data dan analisis data tentang penelitian ini, yaitu Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Pemerintah Daerah Kota Cirebon Pada Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke) Dalam Rangka Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2017. Dalam sub sajian data akan membahas informasi hasil wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria, data sajian pustaka, dan data dokumentasi. Setelah itu, pada sub selanjutnya yaitu sub analisis data peneliti akan menganalisis hasil temuan data dari mulai mereduksi hingga melihat keabsahan data pada penelitian ini.

A. Sajian Data

Pada bagian sajian data ini, seperti yang telah dipaparkan dalam bab I yang mana penelitian ini menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu, wawancara yang berfokus pada wawancara mendalam (*in-depth interview*), sajian pustaka, dan dokumentasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan bertumpu oleh *interview guide* yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, dengan harapan jawaban dan informasi dari wawancara akurat dan sesuai dengan pembahasan penelitian strategi pemasaran sosial ini. Sajian pustaka dan dokumentasi adalah hasil temuan data di lapangan pada saat penelitian berlangsung, dengan harapan dapat menjadi data penguat penelitian ini.

Pertanyaan wawancara mendalam dijawab oleh beberapa institusi dan lembaga terkait penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Siti Halimah selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA).
2. Mamah selaku Bidang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA).
3. Suryadi selaku Ketua Program Wadul Bae.
4. Drg. Siska Liliana Muliadi selaku Ketua Harian P2TP2A.
5. Sрни Piyanti, P. Si selaku Bidang Advokasi dan Pendampingan di P2TP2A, Wadul Bae dan selaku Psikolog di PPT RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.
6. Erna Kustiana selaku Pekerja Sosial Medis di PPT RSUD Gunung Jati Kota Cirebon
7. Dr. Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto., MM selaku Ketua Cabang Baznas Kota Cirebon.
8. M. Anwar Musaddad, S.Ag., M.Si selaku Direktur Eksekutif Zakat Center Kota Cirebon.
9. Iman Handiman selaku *Branch Manager* Rumah Zakat Kota Cirebon.

Sedangkan dokumentasi didapatkan melalui sumber-sumber yang berkaitan dari media *online*, dokumen pribadi dari tempat penelitian dan sajian pustaka didapat dari data-data pribadi yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait, DSPPPA, P2TP2A, PPT RSUD Gunung Jati dan pihak-pihak kemitraan (Baznas, Rumah Zakat, Zakat Center) Kota Cirebon.

Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemasaran sosial Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menekan tingkat

kekerasan seksual pada anak tahun 2017 melalui Program Wadul Bae, yang mana dalam sajian pustaka ini akan dibagi ke beberapa klasifikasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang akan di paparkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Riset Selama Dua Tahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae

Kekerasan seksual pada anak adalah sebuah isu dan fenomena yang cukup sensitif di Kota Cirebon, menurut hasil wawancara bersama Ibu Siti Halimah selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak DSPPA Kota Cirebon pada tanggal 22 Desember 2017, Ibu Siti membenarkan pernyataan Ibu Sрни Piyanti selaku Psikolog PPT dan bidang Advokasi dan Pendampingan Program Wadul Bae, bahwa sebanyak 85% kasus kekerasan di Kota Cirebon adalah kekerasan seksual pada anak. Perkembangan kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon sudah seperti fenomena gunung es, yang mana semakin lama semakin membesar. Ibu Siti berpendapat bahwa anak adalah objek paling lemah untuk tindakan kekerasan, baik di lingkungan keluarga, rumah, dan sekolah banyak hak-hak anak yang sebenarnya belum terpenuhi.

Perkembangan fenomena kekerasan itu seperti fenomena gunung es gitu ya, istilahnya. Anak itu kan sebenarnya adalah objek yang lemah yah. (sumber : wawancara bersama Ibu Halimah Peksos Kasus Anak, pada tanggal 22 Desember 2017).

Pedofil adalah kata-kata yang mengerikan untuk tindakan kekerasan seksual pada anak, pelaku pedofil bisa dihukum kebiri oleh pemerintah sesuai peraturan dalam UU, namun pelaku fenomena

kekerasan pada anak saat ini lebih mengesankan dibanding seorang pedofil, yaitu pelakunya adalah anak-anak dan yang menjadi korban juga adalah anak-anak. Fenomena ini banyak terjadi seiring berkembangnya jaman, adanya media baru seperti internet bisa menjadi pemicunya. Dari hasil wawancara bersama Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak, beliau mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar dari anak-anak yang melakukan tindakan tersebut tidak paham jika hal tersebut adalah suatu tindakan asusila yang tidak seharusnya dilakukan, dan ternyata setelah ditelusuri mereka hanyalah meniru “adegan” atau “gambar” dalam “alat pintar mereka” (*gadget*) seperti *handphone* yang mempunyai fasilitas internet tersebut menampilkan gambar-gambar yang seharusnya tidak layak untuk dilihat anak kecil.

Kalo kekerasan seksual pada anak unsurnya itu dari arus globalisasi, *social change* atau perubahan sosial, anak-anak kecil sudah main *gadget*. Ketika tindakan kekerasan seksual korbannya adalah anak, pelakunya adalah anak itu kan sudah luar biasa (sumber : wawancara bersama Ibu Halimah selaku Peksos Kasus Anak di DSPPPA dan P2TP2A Wadul Bae, pada tanggal 22 Desember 2017)

Menurut dokter forensik RSUD Gunung Jati, Dr Putu Melati SpF, tindakan kekerasan ini pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat, bisa keluarga, guru atau tetangga, orang-orang yang seharusnya melindungi (RadarCirebon.com, Jumat 11 September 2015 14:42 WIB, diakses pada tanggal 17 Desember 2017).

Untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, DSPPPA Kota Cirebon membentuk suatu wadah untuk merancang

suatu perencanaan strategi berbentuk program-program sosialisasi, tujuannya untuk mengubah perilaku sosial masyarakat Kota Cirebon. Strategi unggulan dalam penanganan fenomena kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon yaitu adanya bentuk kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam programnya Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke).

Adapun data dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, sebagai berikut :

Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Cirebon Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon yang bekerjasama dengan P2TP2A	
Tahun	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2010	35 kasus
2011	15 kasus
2012	30 kasus
2013	22 kasus
2014	41 kasus
2015	54 kasus
2016	29 kasus
2017	26 kasus
Total kasus	276 kasus
Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Cirebon Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	
Tahun	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2014	17 kasus
2015	19 kasus
2016	43 kasus
2017	39 kasus
Total kasus	118 kasus

*Tabel 3.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Cirebon.
Sumber : Data pribadi DSPPPA dan data pribadi PPT RSUD Gunung Jati.*

Dilihat di *tabel 3.1* diatas terlihat bahwa jumlah kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon menurun dari tahun 2016 ke tahun 2017 namun tidak ada penurunan yang signifikan. Wadul Bae adalah program pemerintah yang didasari oleh penelitian terkait kekerasan di Kota Cirebon, dan dibuatlah perencanaan terkait Program Wadul Bae, setelah melalui proses yang cukup panjang barulah terbentuk program yang telah di SK an oleh Wali Kota Cirebon pada tahun 2005 sampai dengan saat ini.

Dalam memutuskan membuat perencanaan program, Wadul Bae telah melakukan analisis dan pengamatan situasi di lingkungan, agar program yang dijalankan tepat sasaran dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Sebelum Wadul Bae dibuat, Pak Suryadi sebagai ketua pelaksana dan segenap masyarakat Kota Cirebon yang peduli terkait penanganan kasus kekerasan yang marak terjadi di Kota Cirebon menganalisis situasi di lapangan terlebih dahulu. Dalam hasil wawancara, Pak Suryadi dengan yakin mengatakan bahwa dirinya yakin perencanaan Program Wadul Bae akan sukses karena Pak Suryadi dan timnya telah melakukan pengamatan kurang lebih dua tahun lamanya untuk menentukan apakah Program Wadul Bae layak dijalankan atau tidak, awal mulanya memang Pak Suryadi dan tim acuh tak acuh dengan fenomena kekerasan yang kian tahun semakin marak di Kota Cirebon, namun temuan fakta bahwa perempuan dan anak di Kota Cirebon termasuk ke dalam rentan korban kekerasan yang semakin marak di Kota Cirebon pada tahun 2001-2004, tak hanya itu dilihat juga dari

masyarakat yang enggan melapor terkait kasus-kasus kekerasan disekitarnya. Ditambah dengan dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah terkait aturan perundang-undangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu bagian dari UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), lalu pihak tim perancang program Wadul Bae semakin yakin untuk gabung dalam program pemerintah karena melihat UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, dan UU No.21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, maka Pemerintah Kota Cirebon diwajibkan membuat suatu upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak, maka Pak Suryadi dan tim memberanikan diri untuk merancang Program Wadul Bae yang mana perencanaan program ini mendapat dukungan yang kuat dari banyak kalangan dan banyak pihak, antara lain adalah dukungan dan kerjasama dari pihak Puskesmas Kota Cirebon, dukungan dan kerjasama dari Polresta Cirebon, dukungan dan kerjasama dari FAC (Forum Anak Cirebon), dukungan dari pihak Kejaksaan dan Pengadilan.

Pada saat lima tahun pertama Program Wadul Bae berjalan tanpa bantuan pemerintah pun Wadul Bae mendapat bantuan dana dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Indonesia dalam membuat pelayanan terpadu untuk perlindungan anak, dan bantuan dari *The United Nations Population Fund* (UNFPA) untuk perlindungan perempuan, pada lima

tahun pertama di SK kan oleh Pemerintah Kota Cirebon, yaitu 2005-2010, dan baru-baru ini pada tahun 2014 yang mana awal mula terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kota Cirebon tepatnya di RSUD Gunung Jati, dukungan dari PPT RSUD Gunung Jati, dukungan dari relawan dokter dan tim medis, dan banyaknya jejaring Wadul Bae yang menjadi penguat.

Adapun kekhawatiran Pak Suryadi dan tim dalam merencanakan Program Wadul Bae. Pada saat merancang program ini, Tim Wadul Bae meyakini bahwa kelemahan utama program ini adalah dana dan anggaran. Melihat hal bahwa dalam program ini Tim Wadul Bae ingin semua fasilitas dan pelayanan di gratiskan, dan yang melayani pun seperti kader, dokter, psikolog, dan polisi di Wadul Bae tidak dibayar atau digaji, karena ini adalah program layanan sukarela yang mana bukan program wajib Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sehingga pemerintah tidak memberikan anggaran kepada Program Wadul Bae. Kurangnya dana pun menjadi kelemahan dalam program ini.

Berhubungan dengan hal tersebut, sebelum membuat Program Wadul Bae, Ketua pelaksana dan tim Wadul Bae telah melihat sisi ancaman dalam perencanaan Program Wadul Bae, yaitu berhubung Program Wadul Bae adalah program layanan yang didirikan oleh masyarakat yang peduli, bukan dari pihak pemerintah langsung, maka ancaman dari keberlangsungan program adalah anggaran yang sangat terbatas karena tidak ada bantuan anggaran dari Pemerintah Kota Cirebon. Juga ditambah dengan sulitnya membina, mengedukasi, mengajak warga untuk berani melapor, bahkan

menurut ungkapan dari Pak Suryadi, selaku Ketua Program Wadul Bae mengaku sampai saat ini masih sulit untuk mengajak warga untuk berani melapor.

2. Mengelompokan Khalayak Sasaran Untuk Promosi Pemasaran Sosial Program Wadul Bae

Setelah menganalisis situasi dan kondisi yang ada di lapangan selama kurang lebih dua tahun, Tim Wadul Bae juga mengelompokan khalayak yang menjadi target sasarannya. Menurut Venus (2012:98) untuk memilih khalayak sasaran sebelum melaksanakan suatu kegiatan dapat dispesifikasikan kedalam beberapa segmen, yaitu :

a. Segmen Geografis

Secara geografis Kota Cirebon termasuk dalam unit kriteria geografis kota dan desa. Daerah yang sering jadi target sasaran Program Wadul Bae adalah semua daerah di Kota Cirebon, karena program ini telah memfasilitasi para kader-kader disetiap kecamatan, kelurahan, bahkan RT dan RW di Kota Cirebon.

b. Segmen Demografis

Program Wadul Bae berfokus kepada pelayanan untuk perempuan dan anak. Perempuan usia berapapun dan anak-anak berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki berusia 0 bulan sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

c. Segmen Psikografis

Segmentasi psikografis untuk pengelompokan beberapa khalayak kedalam beberapa kelompok seperti, kelas sosial, gaya hidup, dan ciri-ciri kepribadian. Untuk mengelompokan khalayak sasarnya, Program Wadul Bae membagi antara kelas menengah keatas dan kelas menengah kebawah, untuk kelas menengah kebawah yang menjadi sasaran khalayaknya yaitu yang mempunyai anak lebih dari dua anak.

d. Segmen Behavioristik

Segmentasi behavioristik (perilaku) konsumen dibagi ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau tanggapan mereka terhadap sebuah produk. Untuk pengelompokan segmen behavioristik Program Wadul Bae mengelompokan khalayak sasaran yang mana untuk anak-anak adalah anak yang nakal, kurang pendidikan, suka bermain *gadget* dan kurang perhatian dari orangtua.

3. Membuat Tim Kader Wadul Bae

Rancangan tim Kader Wadul Bae terinspirasi dari banyaknya kader-kader kesehatan di tiap-tiap Puskesmas atau relawan lapangan di tiap RT RW dan Kecamatan Kota Cirebon, yang mana para kader kesehatan dan relawan tersebut mempunyai berbagai profesi dikehidupan sehari-hari seperti guru-guru di Kota Cirebon, dokter, polisi, hingga ibu-ibu PKK, pelayanan yang dilakukan oleh para relawan seperti pelayanan kesehatan masyarakat Kota Cirebon. Melihat hal tersebut maka Tim Wadul Bae

mulai membentuk kader-kader yang menangani permasalahan sosial di Kota Cirebon, khususnya fenomena kekerasan, baik pada perempuan maupun pada anak.

Menurut hasil wawancara bersama Ketua Pelaksana Program Wadul Bae, Peksos Penanganan Kasus Anak, dan Psikolog, mereka melihat bahwa memang masyarakat Kota Cirebon banyak yang acuh tak acuh dan enggan melapor kasus kekerasan di lingkungannya, namun melihat akrabnya, dekatnya hubungan antar tetangga dengan tetangga yang lain di Kota Cirebon juga menjadi peluang besar adanya Wadul Bae. Wadah pelayanan permasalahan untuk perempuan dan anak di Kota Cirebon pun belum ada sebelumnya, baik dari masyarakat maupun dari Pemerintah Kota Cirebon, ditambah semakin banyak UU yang terkait pelaksanaan pelayanan dan perlindungan untuk perempuan dan anak, Program Wadul Bae menjadi peluang besar untuk wadah perlindungan perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Para Kader Wadul Bae sebelum diterjunkan ke lapangan telah diberikan pelatihan terkait bagaimana mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual pada anak, apa pesan apa yang akan disampaikan pada masyarakat Kota Cirebon, dan cara bagaimana mempersuasi masyarakat Kota Cirebon. Para kader juga diberikan pelatihan dan penyuluhan oleh para pengurus Wadul Bae tentang bagaimana alur pelayanan dalam melayani para korban-korban kekerasan, bagaimana memisahkan pelayanan korban dengan kasus biasa dan luar biasa. Dengan itu pada saat terjun ke lapangan

para Kader-kader Wadul Bae bisa mempersuasi dan mengedukasi masyarakat Kota Cirebon terkait bagaimana mengetahui indikasi-indikasi kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada anak

Lalu pada saat Wadul Bae berjalan dan cukup diketahui di beberapa kalangan seperti kalangan rumah sakit, perumahan banyak pegawai rumah sakit yang mau ikut menjadi Kader Wadul Bae, dan menariknya laki-laki pun banyak yang tertarik untuk mengatasi dan melindungi persoalan ini.

4. Mengimplementasikan Menggunakan Pada Konsep 6P

Strategi pemasaran sosial adalah suatu upaya untuk mengubah perilaku sosial di lingkungan masyarakat. Dalam merancang sebuah program pemasaran sosial perlu dilakukan bauran pemasaran (*marketing mix*) 6P. Tujuan dari bauran pemasaran 6P yaitu untuk menentukan sebuah produk, nilai yang akan ditentukan dalam sebuah produk, tempat kegiatan produk, cara memasarkan produk, bagaimana menjalin kemitraan dengan pihak lain, dan kebijakan seperti apa untuk produk tersebut. Adapun beberapa yang ada dalam definisi Lee dan Kotler (2007:7) yang mencakup 4P (*product, price, place, and promotion*)+2P (*partnership and policy*) yaitu sebagai berikut :

a. Produk (*product*)

Pemerintah Kota Cirebon melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam programnya Wadul Bae, membuat jejaring masyarakat yang dijuluki dengan Kader Wadul Bae, dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada tiap-tiap RT RW dan kecamatan Kota Cirebon dan fasilitas

pelayanan Wadul Bae. Produk dalam kegiatan Wadul Bae adalah kegiatan pelayanan dan sosialisasi yang ada dalam Wadul Bae dan para pengurus program seperti DSPPPA, P2TP2A, PPT RSUD Gunung Jati, kader-kader Wadul Bae, dan juga pihak kemitraan terkait.

b. Harga (*price*)

Pemerintah Kota Cirebon melalui P2TP2A melakukan kerjasama dengan Kader-Kader Wadul Bae untuk menyisihkan waktu, usaha, tenaga, dan resiko dalam membantu melayani kasus dan permasalahan sosial kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak. Kebanyakan dari pihak-pihak kepengurusan Wadul Bae adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan lebih dari satu pekerjaan, harga dalam artian disini adalah, usaha, tekad, kemauan, resiko para pengurus, kader-kader, dan para pihak kemitraan.

c. Promosi (*Promotion*)

Promosi bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk, namun dalam artian di strategi pemasaran sosial promosi diartikan sebagai suatu upaya untuk mempromosikan bentuk kegiatan pemasaran sosial, dalam promosi pemasaran sosial Program Wadul Bae menggunakan media cetak maupun elektronik, seperti TV, Radio dan juga koran. Wadul Bae bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika (DKIS) Kota Cirebon dalam mempromosikan melalui media cetak seperti koran.

d. Tempat (*place*)

P2TP2A Kota Cirebon sebagai Lembaga Pelayanan Terpadu Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah tempat khusus untuk memberikan layanan terpadu pembedayaan perempuan dan anak terhadap kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu Program Wadul Bae yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya atas perempuan dan anak yang bernama Rumah Aman. Strategi tempat dalam program Wadul Bae berkoordinasi bersama pihak dinas terkait, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA), institusi pendidikan di Kota Cirebon, penegak hukum di Kota Cirebon seperti polisi dan pengacara, pihak Polresta Cirebon sendiri memiliki tempat khusus untuk melayani kasus dari Wadul Bae. Organisasi-organisasi yang terlibat lainnya yaitu seperti perkumpulan ibu-ibu PKK, tim medis Kota Cirebon seperti Puskesmas, RSUD Gunung Jati yang menyediakan fasilitas tim medis yang lengkap khusus untuk pelayanan terpadu dan Program Wadul Bae yaitu seperti Dokter Spesialis Bedah, Spesialis Kandungan, Spesialis Jiwa, Spesialis Anak, Dokter Umum, Psikolog, Pekerja Sosial, Bidan dan Perawat.

e. Kemitraan (*partnership*)

Menurut sajian pustaka yang peneliti dapat dari dokumen pribadi P2TP2A yaitu dokumen program kerja Wadul Bae, selain bekerja

sama dengan pihak PPT, Polisi, dan dinas-dinas terkait juga bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Rumah Zakat, Zakat Center dan Baznas yang berada di Kota Cirebon. Namun pada saat peneliti melakukan wawancara bersama pihak lembaga terkait, mereka kurang mengetahui tentang Program Wadul Bae. Pihak Rumah Zakat, Zakat Center dan Baznas Kota Cirebon mengaku bahwa memang mereka melakukan kerjasama kemitraan bersama DSPPPA Kota Cirebon, namun untuk Program Wadul Bae mereka kurang paham terkait kegiatan tersebut.

Pada saat peneliti konfirmasi kepada pihak Pak Suryadi selaku Ketua Wadul Bae, memang Pak Suryadi sendiri mengaku bahwa hanya mengkomunikasikan kerjasama dengan pihak kepengurusan Rumah Zakat, Zakat Center, dan Baznas Kota Cirebon yang lama, dan kebetulan untuk kepengurusan sekarang semua diganti. Mungkin belum ada koordinasi dari pihak kepengurusan lama dan kepengurusan baru di Rumah Zakat, Zakat Center dan Baznas Kota Cirebon terkait kerjasama kemitraan bersama Program Wadul Bae. Untuk bentuk kerjasamanya sendiri, karena untuk mengajak para Warga Kota Cirebon itu sangatlah tidak mudah, maka pihak Wadul Bae selalu melakukan sosialisasi dengan mengikuti program-program sosialisasi lain agar bisa terus mensosialisasikan program Wadul Bae. Misal, ada sosialisasi tentang KB, kemudian Wadul Bae ikut bergabung dengan kegiatan tersebut lalu, ada sosialisasi

santunan kepada anak-anak yatim, Wadul Bae juga ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Cirebon juga bekerjasama dengan LSM *Woman Crisis Center* yang mendukung Pemerintah Kota Cirebon dan juga Forum Anak Kota Cirebon sebagai wadah penanganan dan pencegahan kekerasan anak di Kota Cirebon terutama kekerasan seksual pada anak.

f. Kebijakan (*Policy*)

Peran pemegang kebijakan dalam pelayanan terpadu terkait kekerasan pada perempuan dan anak adalah Pemerintah Kota Cirebon. Program Wadul Bae hanyalah wadah untuk mengembangkan visi pemerintah dalam melayani hak hak atas perempuan dan anak, terlebih kekerasan seksual pada anak yang harus diatasi dan dicegah. Adapula implementasi hukum nasional yang menjadi landasan utama yaitu, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Masyarakat yang peduli (yang sekarang telah bergabung dengan P2TP2A) terkait permasalahan yang telah menjadi permasalahan sosial tersebut akhirnya membuat program pemasaran sosial didukung oleh Pemerintah Kota Cirebon. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Warga Peduli Bocah Lan Mboke (Wadul Bae) terbentuk dan di beri SK oleh Wali Kota Cirebon pada tahun 2005. Program Wadul Bae semakin yakin untuk berjalan dengan dikuatkan karena adanya

dorongan kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut terlihat bahwa pemerintah menganggap bahwa kekerasan seksual pada anak ini penting, sehingga memang dibuat sebuah kebijakan melalui sebuah Undang-undang. Oleh karena itu dibuat implementasi hukum nasional pada tahun 2006 dan 2007, yaitu, UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Selanjutnya regulasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya dengan kebijakan saja, namun regulasi juga harus di implementasikan dalam sebuah program. Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah di atur dalam kebijakan pemerintah, membuat sebuah gerakan yaitu melalui program Wadul Bae, menggandeng Wadul Bae yang mana dulunya adalah sebuah LSM wadah penanganan kasus kekerasan dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Cirebon. Lalu Awal tahun 2018 Pemerintah Kota Cirebon menjadikan Wadul Bae masuk kedalam program Cirebon menuju gerakan 100 Smart City di Indonesia. Wadul Bae menjadi empat program utama unggulan Smart City yang mana dalam mengimplementasikannya ada aplikasi-aplikasi khusus pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk dana khusus pencegahan dan sosialisasi kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual pada anak Pemerintah Kota Cirebon mengambil 20% dari Anggaran

Pengeluaran Belanja Pendidikan Daerah di Kota Cirebon pada tahun 2017.

5. Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Sosialisasi Pemasaran Sosial Program Wadul Bae

Program Wadul Bae bekerjasama dengan masyarakat Kota Cirebon yang peduli dan ikhlas membantu keberlangsungan program tersebut, para masyarakat tersebut diberikan julukan yaitu, “Kader Wadul Bae”. Para Kader Wadul Bae, hingga saat ini sudah berjumlah kurang lebih 70 orang, semua kader tersebar di seluruh 5 Kecamatan, 247 RW dan 1.352 RT di Kota Cirebon.

Dengan adanya kader-kader tersebut dapat membantu menjalankan strategi, kader-kader selain membantu melayani korban-korban juga ikut terjun langsung dalam melakukan kegiatan sosialisasi, tujuannya untuk mengedukasi para masyarakat, agar mengetahui ciri-ciri tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak sampai memproses kasus untuk para korban dan keluarganya. Tujuan dari Program Wadul Bae sebagai berikut :

- a. Menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak sejak masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun.
- b. Meningkatkan peran serta warga dalam menciptakan lingkungan protektif dan ramah terhadap anak
- c. Memiliki data basis yang dapat dijadikan bahan rujukan bila terjadi tindak pelanggaran hak-hak anak di Wilayah Kota Cirebon.

Strategi pemasaran sosial yang dilakukan dalam Program Wadul Bae yaitu dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat Kota Cirebon melalui sosialisasi di tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cirebon, yang berjumlah 5 Kecamatan, 22 Kelurahan, 247 RW dan 1.352 RT di Kota Cirebon.

Dalam pelaksanaan program, pengurus Program Wadul Bae juga mengelompokkan beberapa bidang-bidang untuk membantu jalannya proses kasus, tidak hanya itu ada pula bidang khusus sosialisasi dan penyuluhan, tujuan dari adanya bidang sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk menggerakkan strategi komunikasi kepada masyarakat, bidang tersebut bertugas untuk melakukan sosialisasi Hukum dan HAM kepada 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan di Kota Cirebon.

Selain kegiatan mensosialisasikan dan mengedukasi pencegahan tindakan kekerasan, adapun pembinaan dan pendampingan untuk anak jalanan melalui kegiatan pelayanan, dan pelatihan pendampingan bagi Kader Wadul Bae. Namun dari hasil wawancara bersama Ketua Pelaksana, beliau mengatakan bahwa mensosialisasikan dan mengedukasikan masyarakat Kota Cirebon khususnya terkait fenomena kekerasan seksual pada anak, yang mana fenomena tersebut paling banyak terjadi di Kota Cirebon sulit dilakukan. Pasalnya, warga masih beranggapan bahwa itu adalah permasalahan pribadi, dan sebagian menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga. Namun tak habis akal sampai disitu, Wadul Bae mempunyai taktik yang mana adalah sifat dari sosialisasi Wadul Bae yaitu

“ngikut”, kegiatan ini cukup unik dalam setiap melakukan sosialisasi Wadul Bae tidak berjalan sendirian, Wadul Bae selalu bergabung dengan program-program lainnya, seperti kegiatan sosialisasi vaksin anak, nanti ada kader-kader Wadul Bae yang ikut kedalamnya dan disela-sela sosialisasi vaksin tersebut akan diselipkan edukasi terkait mendeteksi tindakan-tindakan kekerasan pada anak. Lalu ada sosialisasi lain terkait KB atau penyakit-penyakit, ataupun kegiatan santunan anak yatim, nanti Wadul Bae akan masuk kedalam dan menyelang beberapa informasi terkait permasalahan kekerasan dan cara pencegahannya.

Maka dari itu Wadul Bae mempunyai Bidang Jejaring dan Kemitraan yang bertugas untuk membuat jejaring dengan beberapa lembaga beberapa diantaranya yaitu Rumah Zakat, Zakat Center, Banzas dan dunia usaha, untuk selalu berhubungan baik dengan pihak kemitraan, agar program Wadul Bae dapat berjalan dengan progres yang positif.

Kita mengadakan tindakan preventif kan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah, kemudian sosialisasi di rumah kepada orangtua tentang bagaimana cara pengawasan orangtua dalam mengawasi anak-anaknya (sumber : wawancara bersama Ibu Halimah selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak di DSPPPA dan P2TP2A Wadul Bae, pada tanggal 22 Desember 2017).

Adapun kegiatan yang diselenggarakan langsung oleh pihak Wadul Bae menurut Ibu Sрни Piyanti selaku Psikolog PPT dan bidang Advokasi dan Pendampingan Wadul Bae yang berhubungan dengan sosialisasi kepada remaja yaitu berbentuk FGD, kelas *parenting*, konsultasi gratis, penyuluhan tiap sekolah dan fasilitas satgas kekerasan ditiap sekolah. Pesan-pesan yang disampaikan dalam sosialisasi adalah bagaimana cara untuk mendeteksi

indikasi-indikasi kekerasan dilingkungan sekitar, khususnya kekerasan pada anak meliputi kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang marak terjadi.

Namun, sangat disayangkan adalah, semua dokumentasi kegiatan tersebut tidak diarsipkan kedalam dokumentasi kegiatan P2TP2A, semua kegiatan hanya di dokumentasikan oleh pihak penyelenggara resmi kegiatan sosialisasi saja, ataupun ada kader atau kepengurusan Wadul Bae yang mendokumentasikan itu hanyalah menjadi keperluan dokumentasi pribadi masing-masing saja.

Ada juga bentuk lain dari sosialisasi untuk mengedukasi, yang mana saat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mempunyai program *Three Ends* yaitu, akhiri kekerasan terhadap anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Khusus untuk anak dan remaja, adanya strategi lomba gerak dan lagu atau *jingle*, yang mana lagu atau *jingle* tersebut menggunakan bahasa Indonesia pada umumnya. Lirik dari lagu atau *jingle* tersebut diciptakan oleh masing-masing tiap daerah, yang isinya menceritakan dan mengedukasi anak-anak agar berani menghindari indikasi-indikasi kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut dibuat karena menyadari bahwa untuk membuat remaja tertarik dan peduli akan isu kekerasan seksual pada anak dan remaja itu harus dengan cara yang menarik, maka dari itu menggandeng Gramedia dan *mall* ternama di Kota Cirebon yaitu *CSB Mall*, kegiatan tersebut untuk kalangan sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA

Negeri maupun Swasta. Kegiatan ini digandeng oleh Perhimpunan Tionghoa Indonesia (PTI) untuk masuk ke sekolah-sekolah.



Gambar 3.1 Deklarasi Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Program *Three (3) Ends*.
Sumber : *RadarCirebon.com* (diakses pada tanggal 14 Maret 2018)

Sumber: *jabarprov.go.id*



Gerak dan Lagu *Three Ends* P2TP2A Forum Anak Kota Cirebon

DP3AKB, PHA

Gambar 3.2 Program *Three (3) Ends* P2TP2A Mewakili Kota Cirebon dalam acara Jambore Forum Anak Jawa Barat 2016. Sumber : *jabarprov.go.id* (diakses pada tanggal 14 Maret 2018)

Lalu ada Program *Wadul Bae* yang menurut Pak Suryadi memang terlihat mudah, namun pada saat dilaksanakan sangat tidak mudah, yaitu kegiatan “*Maghrib Mengaji*” yang hanya ada di perkampungan RT 10 Kecamatan Kecapi, Harjamukti, Kota Cirebon. Program “*Maghrib Mengaji*” dilakukan dengan *door to door*, awalnya banyak warga yang enggan mengikuti dan tidak terima, namun lama-lama banyak warga yang

menyadari akan keefektifan program tersebut, dapat mencegah para anak remajanya yang bermain di malam hari, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kenakalan-kenakalan remaja, dan mengedukasi remaja Kota Cirebon.



Gambar 3.3 Kegiatan Program Maghrib Mengaji di RT 10 Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Sumber : www.jawapos.com (diakses pada tanggal 14 Maret 2018)

Dapat dilihat pada *gambar 3.1* terkait deklarasi aksi program *Three (3) Ends*, *gambar 3.2* Kampanye program *Three (3) Ends* dalam kegiatan Jambore Forum Anak Jawa Barat 2016 dan *gambar 3.3* bahwa, kegiatan P2TP2A terkait Program *Three (3) Ends* yang sudah dilakukan sejak tahun 2016, dan kegiatan Program Maghrib Mengaji yang dilakukan sejak tahun 2017 di dokumentasikan oleh pihak-pihak media, dan memang pihak Wadul Bae menyatakan tidak mempunyai dokumentasi-dokumentasi terkait kegiatan. Maka dari itu kegiatan program-program tersebut peneliti ambil dari dokumen pribadi media elektronik yaitu *website* dan beberapa artikel terkait.

Namun adapun beberapa dokumentasi pribadi dari kegiatan bersama pihak media dalam menunjukkan eksistensi Wadul Bae, yaitu dengan mempromosikan melalui media-media, seperti dibawah ini :



Gambar 3.4 Foto Ibu Siti Halimah (tengah) selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak di DSPPPA dan P2TP2A dalam acara RCTV *talkshow* Selamat Pagi Cirebon tentang penanganan kekerasan terhadap anak bersama LSM Woman Crisis Center Cirebon. *Sumber: Dokumen pribadi DSPPPA.*



Gambar 3.5 Ibu Siti Halimah (tengah) selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak di DSPPPA dan P2TP2A dalam acara RCTV Selamat Pagi Cirebon tentang kasus penculikan penjualan organ tubuh bersama dokter anak. *Sumber : Dokumen pribadi DSPPPA.*



Gambar 3.6 Foto Ibu Siti Halimah (paling kiri) selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak di DSPPPA dan P2TP2A dalam acara Radio Republik Indonesia (RRI) tentang penanganan anak jalanan bersama Satpop pp dan Dinsos provinsi. *Sumber : Dokumen pribadi DSPPPA*

Dari dokumentasi gambar diatas terlihat bahwa kegiatan promosi kegiatan Wadul Bae turut aktif dalam berbagai macam media, seperti Radio Republik Indonesia, Radar Cirebon Televisi dan media cetak seperti koran. Dapat dilihat juga bahwa yang ditampilkan dalam media bukanlah aksi dari kegiatan sosialisasi Wadul Bae kepada masyarakat, namun lebih kepada literasi atau edukasi, membahas sebuah topik terkait isu-isu permasalahan sosial yang terjadi, seperti penanganan anak jalanan, kasus penculikan, dan tentunya topik yang terkini sedang marak diperbincangkan dan berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

Untuk semua fasilitas dan pelayanan kemasyarakatan ini, Program Wadul Bae bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga terkait, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati, 22 Puskesmas Kota Cirebon, Polresta Cirebon, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK. Dengan adanya kerjasama itu Wadul Bae mempunyai fasilitas pelayanan berupa psikolog, untuk menangani kasus kekerasan dan konseling, mempunyai dokter-dokter spesialis untuk pengobatan dan perawatan, dan fasilitas hukum untuk pelayanan konsultasi bantuan hukum.

Fasilitas lainnya untuk masyarakat secara general bentuknya sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan pendampingan anak jalanan.

Kerjasama antara PPT dan Program Wadul Bae P2TP2A yaitu pembagian tugas hulu ke hilir, yang dimaksud dengan strategi pembagian pelayanan, yang mana untuk fasilitas pelayanan kasus dan korban dikhususnya kepada PPT RSUD Gunung Jati, dan Program Wadul Bae P2TP2A dikhususkan untuk membuat jejaring, yang dinamakan Kader Wadul Bae, untuk membuat strategi ke arah pencegahan, bentuk-bentuk seperti penyuluhan dan sosialisasi untuk mengedukasi para masyarakat, kelas *parenting* (berbasis keluarga), ada juga *Focus Group Discussion* (FGD), konsultasi gratis bagi masyarakat yang mempunyai keluhan atau menerima indikasi-indikasi tindakan kekerasan, dan memfasilitasi satgas kekerasan di setiap sekolah (berbasis sekolah). Tujuannya untuk menekan korban-korban tindakan kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada anak.

Jika para kader-kader Wadul Bae membantu dalam hubungan sosial, berbeda dengan PPT yang dikhususnya ke arah medis, ada berbagai macam tenaga profesi seperti pekerja sosial medis yang mendata korban-korban dan kasusnya untuk di proses baik secara medis sampai dengan ke jalur hukum, ada psikolog untuk konseling, spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis jiwa, spesialis anak, dokter umum, bidan, perawat, polisi dan pengacara.

Tujuan lain diadakan Program Wadul Bae yang bekerjasama dengan PPT, dan lembaga-lembaga lainnya, agar para korban dapat “sembuh” dalam artian bisa beraktifitas seperti sebelumnya, dapat ceria kembali, dan tidak ada lagi keluhan-keluhan akibat trauma seperti ngompol, ngigau, menyendiri dan sebagainya. Dari tujuan itu, keluarga juga turut andil mengamati perilaku korban. Jadi peran keluarga juga penting untuk memantau dan mengamati perilaku korban setelah kejadian.

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Piyanti selaku Psikolog dan Bidang Advokasi dan Pendampingan Wadul Bae, Beliau mengatakan bahwa sistem pelayanan untuk proses rehabilitasi atau proses medis di PPT berlangsung selama enam bulan, tujuannya untuk mengikis rasa trauma yang itu tidak mudah, setidaknya mereka (korban) dapat berinteraksi secara normal seperti sebelumnya. Proses rehabilitasi yang dilakukan, menyangkut pembinaan sekolah korban pasca kejadian, karena dalam proses penyembuhan harus menggandeng lingkungan disekitar korban, yang mana salah satunya harus menggandeng sekolah untuk memantau perkembangan korban tersebut setelah kejadian tersebut.

Dalam penelitian ini beberapa kelompok yang diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi dari Syaib dan Rumondor dalam Ruslan (2003:241) yaitu :

- a. Kelompok memberikan bantuan

Klasifikasi ini tertuju untuk Pemerintah Daerah Kota Cirebon, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DSPPPA) Kota Cirebon dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), karena sesuai dengan klasifikasinya yaitu suatu lembaga/institusi yang mengatur terkait perizinan dan berwenang secara hukum untuk mendistribusikan pemasaran sosial.

b. Kelompok pendukung

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon termasuk dalam klasifikasi pendukung, karena dalam klasifikasi ini menjurus pada partisipan tenaga medis yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Kelompok evaluasi

Untuk klasifikasi kelompok evaluasi yang mana dalam kelompok ini adalah komite legislatif yang memberikan penilaian akhir, apakah program tersebut berpengaruh atau tidak pada masyarakat, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang telah memberikan penghargaan kepada Kota Cirebon melalui DSPPPA terkait Kota Layak Anak tahun 2017.

Dari hasil data temuan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam (www.kla.id)

yaitu adanya kebijakan untuk pemenuhan hak anak, Penguatan Kelembagaan (Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi aparat dan pendamping, kampanye, sosialisasi, dll), Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan pemenuhan hak-hak terkait anak dan permasalahan yang harus ditindak lanjuti terkait kekerasan pada anak, secara menyeluruh.



Gambar 3.7 Kedatangan Tim Verifikasi KLA ke Kota Cirebon. Sumber : www.Cirebonkota.go.id



Gambar 3.8. Kota Cirebon Mendapatkan Penghargaan KLA 2017 di Pekanbaru, Riau. Sumber : www.Cirebonkota.go.id



Gambar 3.9. Bapak H Jamaludin S.Sosselaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dan Drs. Asep Dedi M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Cirebon menerima penghargaan KLA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sumber : www.Cirebonkota.go.id



Gambar 3.10. Penghargaan KLA Kota Cirebon 2017. Sumber : dokumentasi pribadi peneliti

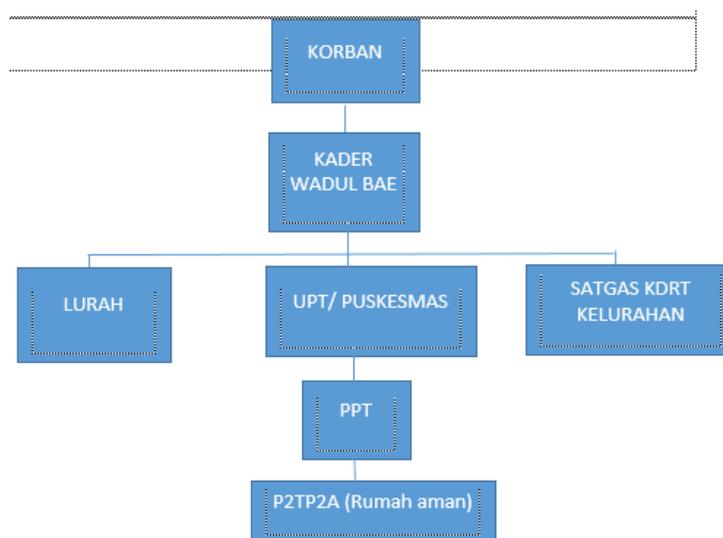


Gambar 3.11. Bersama Bapak H Jamaludin S.Sos selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon. Sumber : dokumen pribadi peneliti

Dari penjelasan indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak diatas, dapat dilihat pada gambar 3.7, 3.8 3.9, 3.10, dan 3.11 bahwa Kota Cirebon telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2017, yang mana dari 249 Kota/Kabupaten yang menginisiasi sebagai Kota Layak Anak di Indonesia, yang berhasil mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak sesuai dengan indikator hanya 23 Provinsi, 126 Kota/Kabupaten di Indonesia (Cahyono Sofyan, www.jawapos.com, diakses pada tanggal 15 Maret 2018). Dari 27 Kota/Kabupaten Jawa Barat, hanya 15 Kota/Kabupaten yang meraih penghargaan Kota Layak Anak tahun 2017 dan Kota Wali ini berhasil medapatkan poin sebanyak 750 poin dari

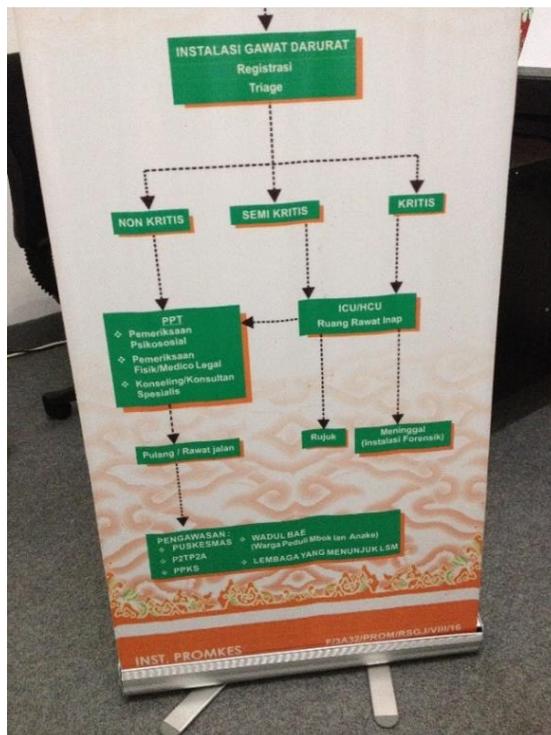
keberhasilan indikator-indikatornya, salah satu peranannya adalah Program Wadul Bae.

Adapun tahapan-tahapan alur penanganan korban-korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak, ada dua tahap yang cukup berbeda, tahap pertama adalah alur dari pelayanan Program Wadul Bae, sebagai berikut :



Bagan 3.1 Alur Pelayanan Wadul Bae Kota Cirebon. Sumber : Dokumen Pribadi P2TP2A

Pada tahapan pertama korban akan datang, sendiri maupun diantar oleh keluarga atau warga dan RT setempat, lalu bertemu dengan Kader Wadul Bae dan ketua RT/RW maupun Satgas KDRT RW, setelah menceritakan kronologi yang terjadi, korban diantar ke UPT atau Puskesmas, Lurah maupun Satgas KDRT Kelurahan, setelah itu dapat rujukan untuk datang ke PPT untuk penanganan medisnya, dan terakhir akan di rujuk kembali ke P2TP2A, karena di P2TP2A terdapat rumah aman untuk para korban kekerasan baik pada perempuan maupun anak. Sedikit berbeda dengan alur yang pertama, alur kedua berjalan seperti berikut :



Gambar 3.12. Alur Pelayanan di PPT RSUD Gunung Jati. Sumber : Dokumentasi Kantor Pelayanan PPT RSUD Gunung Jati

Dari alur pelayanan yang peneliti dokumentasikan pada gambar 3.7, dapat dilihat bahwa korban yang datang ke PPT RSUD Gunung Jati diantar

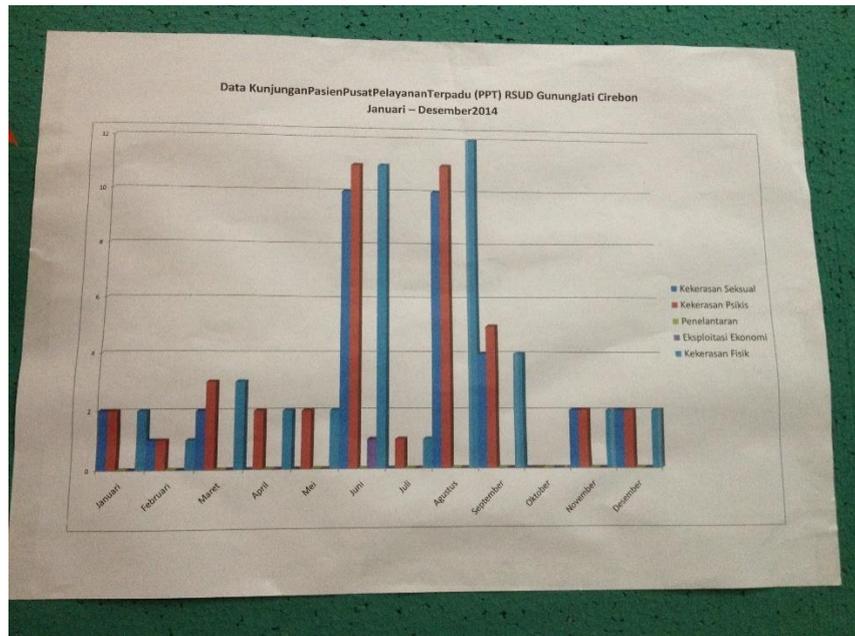
oleh pihak Kader Wadul Bae, lalu di berikan pelayanan langsung seperti ke Instalasi Gawat Darurat untuk registrasi setelah dilakukannya registrasi dapat dilihat korban akan diarahkan kemana, karena adanya tiga jenis korban yaitu non kritis, semi kritis, dan kritis. Non kritis akan langsung diperiksa diruangan PPT, pemeriksaan berupa konseling, tes fisik/ *medisco legal* dengan pihak psikolog lalu dilakukan rawat jalan, dengan pengawasan dari pihak P2TP2 Kader Wadul Bae. Semi kritis dibawa ke ruang ICU/HCU untuk rawat inap, dan kritis jika meninggal akan dibawa ke instalasi forensik.

Dari kedua alur tersebut, menurut Pak Suryadi selaku Ketua Program Wadul Bae, alur yang paling efektif untuk masuk kedalam alur-alur pelayanan diatas adalah 5M, yaitu mendengarkan, mendatangi, mencatat, memperhatikan, membantu, membantu menurut Pak Suryadi tidak harus dengan dana, contoh membantu seperti membantu dalam memecahkan permasalahan, mengantarkan korban ke pihak berwajib, membuat proposal dan segala macam.

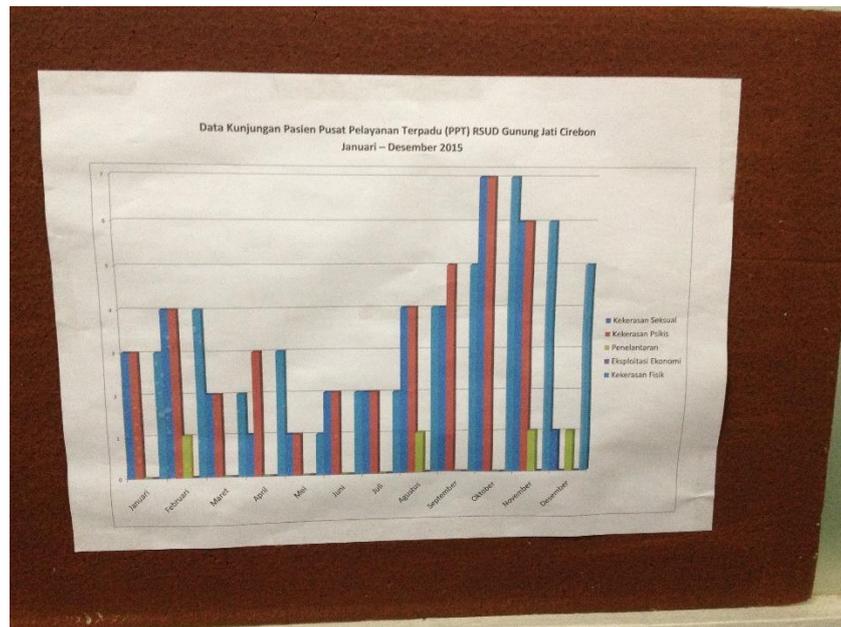
6. Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae

Bentuk kegiatan evaluasi P2TP2A dalam programnya Wadul Bae dengan membuat jadwal pertemuan sebulan sekali dengan kepengurusan, dan tiga bulan sekali dengan DSPPPA Kota Cirebon dan Kader Wadul Bae untuk kegiatan pertemuan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan pelatihan penanganan korban. Dalam pertemuan tersebut bahan yang menjadi pembahasan adalah membahas terkait isu-isu, fenomena, penyakit

yang sedang terjadi di masyarakat, lalu jika pertemuan bersama pihak DSPPPA dan Kader Wadul Bae, membahas terkait bagaimana cara menangani warga, membujuk, mengedukasi, dan pembahasan mengenai evaluasi kegiatan-kegiatan Wadul Bae yang telah terjadi di lapangan seperti berikut :



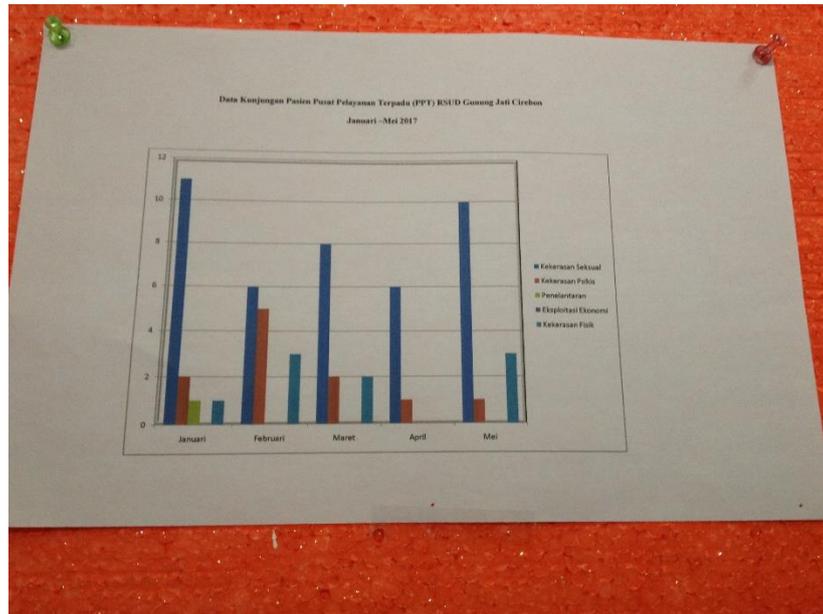
Gambar 3.13 Data pengunjung pasien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati Bulan Januari-Desember tahun 2014. Sumber : Data pribadi PPT RSUD Gunung Jati Kota Cirebon



Gambar 3.14 Data pengunjung pasien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati bulan Januari-Desember tahun 2015. Sumber : Data pribadi PPT RSUD Gunung Jati Kota Cirebon



Gambar 3.15 Data pengunjung pasien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati bulan Januari-Desember tahun 2016. Sumber : Data pribadi PPT RSUD Gunung Jati Kota Cirebon



Gambar 3.16 Data pengunjung pasien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati bulan Januari-Desember tahun 2017. Sumber : Data pribadi PPT RSUD Gunung Jati Kota Cirebon

Hasil dokumentasi peneliti pada *gambar 3.8*, *gambar 3.9*, *gambar 3.10*, dan *gambar 3.11* menunjukkan hasil rangkuman terkait data pengunjung pasien di PPT Gunung Jati Kota Cirebon, dari ke empat gambar data kunjungan pasien data dilihat bahwa pasien yang paling sering datang adalah korban-korban tindakan kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan psikis maupun kekerasan fisik. Jika dilihat pada ke empat data tersebut, data kunjungan kekerasan seksual adalah kasus paling dominan meningkat setiap tahunnya yang selalu ditangani oleh pihak PPT RSUD Gunung Jati.

Dilihat pada *gambar 3.8* bahwa pada data kunjungan bulan Januari-Desember tahun 2014 korban kekerasan seksual tidak stabil setiap bulannya walaupun pada bulan April, Mei, Juli, dan Oktober tidak ada grafis

kekerasan seksual, namun di bulan-bulan lain terlihat grafis yang tidak stabil terkadang naik dan terkadang menurun. Lalu pada *gambar 3.9* mulai adanya peningkatan kunjungan dari data grafis kekerasan seksual. Pada bulan Januari-Desember tahun 2015 tersebut pasien kekerasan seksual meningkat, bahkan jika dilihat dari data setiap bulannya selalu ada kunjungan dari pasien kekerasan seksual. Pada *gambar 3.10* terlihat semakin jelas bahwa pada grafik kekerasan seksual adalah grafik yang mendominasi dibanding grafik pengunjung kasus lain. Semakin jelas pada pertengahan tahun 2016 bulan Mei hingga Desember, bahwa grafik kekerasan seksual mendominasi. Terakhir adalah grafik tahun 2017 bulan Januari-Mei pada *gambar 3.11* yang mana grafik kekerasan seksual masih mendominasi dibanding kasus lainnya. Menurut hasil wawancara bersama Pak Suryadi selaku Ketua Wadul Bae dan Ibu Siska selaku Ketua Harian P2TP2A mengatakan bahwa, dalam sekretariat atau kantor P2TP2A juga mempunyai daftar hadir para pasien yang datang, akan tetapi setiap tahunnya tidak direkap seperti yang PPT lakukan.

Hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan program Wadul Bae yaitu masyarakat yang berani melapor, dan tolak ukur keberhasilan lainnya adalah dapat melatih, mendidik para Kader Wadul Bae agar mempunyai mental yang kuat, tidak lemah dan dapat meyakinkan warga agar mau melapor. Mental yang kuat harus tertanam dalam diri masing-masing individu yang ikut serta dalam pengembangan Program Wadul Bae, karena pada hasil wawancara bersama ketua pelaksana Wadul Bae mengatakan

bahwa, untuk meyakinkan para warga tidak mudah, meyakinkan warga masih dengan cara *door to door* dan untuk meyakinkan satu keluarga harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Warga memang awalnya tidak suka permasalahan keluarganya “diusik” namun, beberapa cara yang terlihat hasilnya membuat warga semakin terbuka pemikirannya. Harapan dari pelaksanaan evaluasi rutin yaitu agar masyarakat berani untuk melapor dan lebih banyak melapor, dengan melapor dapat mengurangi angka kekerasan seksual khususnya pada anak di Kota Cirebon.

Dengan banyaknya yang melapor itu berarti mengurangi “gunung es” dilapangan. Artinya tidak memandang suatu kalangan, semua kalangan itu harus melapor, karena masyarakat pasti merasakan hasilnya (sumber : wawancara bersama Pak Suryadi selaku Ketua Wadul Bae, pada tanggal 12 Maret 2018).

Harapan kedua agar para kader selalu mempunyai keterampilan dalam meyakinkan warga dalam mengedukasi warga terkait permasalahan sosial ini. Lalu harapan Beliau selanjutnya adalah agar pemerintah dapat lebih memperhatikan jejaring sosial ini lagi, walaupun kita sudah mengkomunikasi dan bekerjasama dengan semua pihak namun lambat laun sudah jarang berkumpul karena kesibukan masing-masing. Harapannya ingin tetap selalu memperhatikan masyarakat dengan segala kemampuan, baik kemampuan secara material maupun non material.

B. Analisis data

1. Melaksanakan Riset Selama Dua Tahun Untuk Perencanaan Program Wadul Bae

Terkait dengan strategi DSPPPA untuk menekan tingkat kekerasan seksual pada anak, yang mana hal tersebut didasari dengan kebijakan publik. Bahasa lain dari kebijakan publik itu sendiri dalam keputusan internasional disebut sebagai *public policy*, menurut pendapat pakar terkait kebijakan publik, Thomas (dalam Nugroho, 2003:3), bahwa kebijakan publik sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi permasalahan sosial di masyarakat sehingga mampu menjawab persoalan negara.

Maka dengan adanya implementasi hukum nasional, ekspektasi dari aturan pemerintah pusat maupun daerah sebenarnya wajib menyelenggarakan upaya-upaya terkait perlindungan bagi perempuan dan anak dari bahaya kekerasan dalam bentuk pelayanan terpadu. Namun, realita yang terjadi tidak semua daerah mempunyai kebijakan tersebut. Program Wadul Bae yang telah disepakati menjadi program pemerintah pada awal tahun 2010 dan masuk kedalam program unggulan P2TP2A Kota Cirebon menjadikebijakan pemerintah untuk menggabungkan kerjasama antara masyarakat (Program Wadul Bae) dan Pemerintah Kota Cirebon (P2TP2 dan DSPPPA) menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial yang marak terjadi di Kota Cirebon khususnya terkait fenomena kekerasan. Menurut pendapat peneliti pilihan untuk memberikan kontribusi dalam menangani permasalahan sosial ini adalah pilihan yang

tepat karena dengan adanya program layanan untuk masyarakat ini sama saja dengan memberikan perhatian lebih untuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya dalam melindungi anak yang rentan akan korban kekerasan seksual di Kota Cirebon, melihat setiap tahunnya Kota Cirebon selalu memiliki permasalahan sosial yang sama yaitu, jumlah kekerasan yang terus meningkat. Adanya kebijakan diadakan Wadul Bae seharusnya dapat membuka pemikiran masyarakat Kota Cirebon, bahwa tidak perlu takut untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib dan mengedukasi masyarakat terkait tanda-tanda kekerasan. Namun kenyataannya masyarakat Kota Cirebon masih saja menganggap bahwa fenomena ini adalah hal yang masih sensitif untuk ditangani.

Sebelum memutuskan untuk membuat suatu program maupun kegiatan, agar program tersebut efektif dan tepat sasaran perlunya dilakukan analisis lingkungan dan situasi. Dalam menganalisis suatu lingkungan banyak cara yang dilakukan menggunakan beberapa instrumen analisis, seperti analisis pengamatan yang dilakukan Tim Wadul Bae menganalisis dengan caranya sendiri yaitu mengamati kondisi lingkungan dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mereka hanya melihat pada kenyataan di lapangan saja selama dua tahun lamanya. Menurut peneliti pengamatan selama dua tahun harusnya dapat memberikan dampak yang maksimal, bisa mengetahui keinginan warga, bukan hanya keluhan warga. Namun, temuan data dilapangan melihat bahwa pengamatan selama dua tahun belum bisa memberikan dampak dari Program Wadul Bae secara

maksimal, yaitu belum bisa mengetahui program kegiatan apa yang menjadi minta masyarakat Kota Cirebon dalam menangani masalah sosial seperti fenomena kekerasan dan dari hasil temuan lapangan terlihat bahwa kepengurusan yang membuat Program Wadul Bae belum memikirkan efek untuk kedepannya, yaitu seperti program akan berjalan dengan efektif atau tidak layak atau tidak pada proses pengamatan selama dua tahun.

2. Mengelompokkan Khalayak Sasaran Untuk Promosi Pemasaran Sosial Program Wadul Bae

Dalam memilih khalayak sasaran yang akan dijadikan target sasarannya, Tim Program Wadul Bae dengan tepat mengelompokkan kepada beberapa segmen, sesuai dengan teori spesifikasi kelompok kedalam beberapa segmen oleh Venus (2012) yang mengelompokkan seperti segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografis, dan segmen behavioristik.

Pada segmen geografis, dimana mengelompokkan khalayak yang menjadi target sasaran yaitu masyarakat Kota Cirebon. Tentunya hal tersebut menjadi pilihan yang tepat karena memang permasalahan yang harus ditangani secara khusus berada di Kota Cirebon, walaupun menurut hasil temuan lapangan, pada sajian data bahwa Wadul Bae pun tidak keberatan dalam melayani warga dari berbagai macam daerah di Indonesia, karena ingin mengusung konsep NKRI. Biarpun tidak banyak korban dari daerah lain yang berkonsultasi kepada Wadul Bae. Hal ini juga menjadi pilihan yang mulia, walaupun tujuan dan fokus utamanya untuk masyarakat

Kota Cirebon, ditengah kesibukan melayani masyarakatnya, pemerintah membiarkan masyarakat dari daerah lain untuk dilayani.

Segmen demografis yang mengelompokkan *gender* dan usia Tim Wadul Bae menjadi pilihan yang tepat menurut peneliti, pasalnya dalam Program Wadul Bae yang mana hanya melayani perempuan dari semua usia dan anak-anak dari usia 0 bulan hingga 18 tahun. Memang fokus permasalahan yang banyak terjadi pada umur anak yang bervariasi, dan perempuan adalah korban paling dominan dibanding laki-laki.

Segmen psikografis yang dipilih oleh Wadul Bae dalam mengelompokan target sarannya tidak memandang status ekonomi. Dalam mengelompokan target sasaran kegiatan dengan tidak memandang status ekonomi sudah tepat, karena permasalahan sosial yang terjadi, terlebih permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak di Kota Cirebon itu tidak memandang status sosial, namun memang fokus utama Wadul Bae dengan memfokuskan kepada kelas sosial menengah kebawah dan keluarga yang mempunyai banyak anak. Hal tersebut menurut peneliti kurang tepat, karena permasalahan seperti ini tidak memandang status ekonomi ataupun kelas sosial. Banyaknya jumlah anak dalam sebuah keluarga menjadi alasan orangtua tidak memantaunya, itu pun tergantung dari didikan atau ajaran dalam keluarga masing-masingbukan melihat dari banyak atau sedikitnya anak, apalagi status ekonomi sekelompok masyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan ajaran dan didikan dari pihak keluarga, adapun segmen behavioristik yang menjadi pilihan Wadul Bae dengan melihat didikan dari keluarga, kebiasaan anak seperti bermain *gadget* dan memilih lingkungan bermain menjadi pilihan yang tepat menurut peneliti, karena anak adalah cerminan didikan dan pantauan dari keluarganya, keluarga tidak bisa terlalu membiarkan anak bebas, namun tidak bisa juga terlalu mengekang keinginan anak. Dengan memilih segmen behavioristik yang seperti itu dapat membuat topik yang tepat dalam mengedukasi Warga dan Keluarga di Kota Cirebon.

3. Membuat Tim Kader Wadul Bae

Dalam pernyataan Bessette menjelaskan bahwa partisipasi dapat dilihat dari keterlibatan aktif para komunitas dalam berbagai kelompok, bersama dengan *stakeholder* yang terlibat, para kader atau agen sosial, dan pengambil kebijakan.

Bessette (2004:1) menyatakan “*community participation mean facilitating the active involvement of different community group, together with the other stakeholder involved, and the many development and reseacrh agent working with the community and decision makers*”

Hal tersebut terlihat bahwa adanya partisipasi yang baik dari para kader yang sampai dengan saat ini sudah berjumlah 70 orang, juga dukungan dari Pemerintah Kota Cirebon dalam menyikapi kasus kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut dikarenakan pada temuan lapangan yang mana dari semua kasus kekerasan, sebanyak 85% nya adalah kekerasan seksual pada anak marak terjadi di Kota Cirebon.

Adapun pembentukan kelompok dalam Program Wadul Bae terlihat sesuai dengan klasifikasi kelompok menurut Rumondor dalam Ruslan (2003) yang mana, ada tiga klasifikasi kelompok yaitu kelompok memberi bantuan, kelompok pendukung, dan kelompok evaluasi. Pemilihan kelompok yang cukup tepat sehingga fasilitas dalam Program Wadul Bae pun cukup lengkap, mulai dari pemerintahan, kesehatan, hingga lembaga hukum dan tim verifikasi kegiatan.

Namun, untuk kegiatan pelatihan bagi para Kader Wadul Bae, menurut peneliti perlu dievaluasi seperti, adanya pelatihan yang mendalam dan rutin pasalnya pelatihan untuk para Kader Wadul Bae berefek dalam mempersuasi masyarakat Kota Cirebon. Jika melihat temuan lapangan, pelatihan untuk para kader dilakukan belum maksimal, dan belum bisa memberikan efek besar atau merata dalam mempersuasi masyarakat Kota Cirebon. Sangat disayangkan melihat sangat terbantunya dengan adanya fasilitas seperti Kader Wadul Bae harus dimanfaatkan dengan maksimal.

4. Mengimplementasikan Menggunakan Pada Konsep 6P

Untuk melakukan strategi pemasaran sosial, perlu dibentuk konsep bauran pemasaran 6P (4P+2P) yang didalamnya terdapat *product*, *price*, *place*, *promotion*, *partnership*, dan *policy*. Dalam strategi pemasaran sosial yang dilakukan oleh pihak Wadul Bae di sajian data sudah sesuai dengan konsep 6P pemasaran sosial yang mana konsep tersebut berbeda jauh dengan pelaksanaan konsep 4P pemasaran komersil. Namun, jika dilihat hubungan Wadul Bae dengan pihak kemitraan terlihat bahwa kurangnya

koordinasi antara pihak kemitraan dan pihak kepengurusan Wadul Bae. Untuk mengimplementasikan kebijakan pada *policy* dalam 6P seperti tidak ada koordinasi antara pihak pemerintah, melalui DSPPPA dan kepengurusan Wadul Bae.

Konsep 6P sebagai perencanaan Program Wadul Bae memang selaras dengan pelaksanaan strategi pemasaran sosial Wadul Bae, adapun pihak-pihak lain yang menjalin kemitraan bersama dengan DSPPPA dan program Wadul Bae, yang mana lembaga-lembaga ini adalah lembaga sosial yang berkonsentrasi kepada pemberdayaan masyarakat, ada tiga lembaga yang terkait yaitu Baznas, Rumah Zakat, dan Zakat Center.

Saat pada penemuan lapangan saat peneliti konfirmasi pada wawancara mendalam dengan masing-masing lembaga pihak kemitraan, tiap lembaga merasa tidak mengenali dan sedikit asing dengan Program Wadul Bae, lembaga-lembaga tersebut mengakui bahwa adanya kerjasama dengan pihak DSPPPA terkait permasalahan sosial di Kota Cirebon, namun untuk bekerjasama dengan Program Wadul Bae pihak lembaga tersebut tidak mengetahuinya. Menariknya, dalam sajian pustaka data pribadi milik P2TP2A dalam Program Wadul Bae, pihak Wadul Bae mencantumkan nama-nama lembaga terkait pelaksanaan kemitraan tersebut. Data dari sajian data hasil wawancara bersama pihak Wadul Bae terkait mengkonfirmasi terkait ketidaktahuan para lembaga kemitraan, Wadul Bae mengaku telah mengkomunikasikannya secara pribadi dengan pihak kelembagaan terkait, hanya saja mengkomunikasikannya kepada kepengurusan yang lama.

Berbeda dengan pengertian kemitraan sebenarnya, yaitu menjalin hubungan kerjasama dan dituntut untuk selalu berkomunikasi. Dalam mengimplementasikan *partnership* dan *policy* tim Wadul Bae masih kurang adanya koordinasi dan komunikasi, melihat dalam penjelasan Robert (2009:101) bahwa dalam pemasaran sosial harus mengacu pada makna penting kerjasama dengan organisasi lain untuk menangani masalah yang begitu rumit sehingga tidak sendirian dalam menangani masalah. Namun kenyataannya program Wadul Bae masih kurang dalam mengkoordinasikan kegiatan bersama para pihak kemitraannya.

Dalam hal ini, menurut pendapat peneliti, Pihak Wadul Bae kurang mengkoordinasi dengan pihak kemitraannya. Melihat pengertian *partnership* atau kemitraan menurut Robert (2009:101) dalam pemasaran sosial yang mana kerjasama dengan pihak kemitraan seperti organisasi lain untuk menangani masalah yang begitu rumit seperti permasalahan sosial itu sangat penting agar sehingga tidak sendirian dalam menangani masalah. Mungkin perlu dilakukan rapat rutin bersama pihak lembaga kemitraan tersebut. Ditambah program dan kegiatan-kegiatan Wadul Bae yang belum dikenal secara menyeluruh, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan kurang konsisten dalam membuat konsep komunikasi sehingga membuat Program Wadul Bae itu sendiri kurang dikenal oleh pihak kemitraannya sendiri. Sebaiknya Tim Wadul Bae harus lebih erat lagi dalam menjalin hubungan bersama pihak kemitraan, bagaimanapun juga komunikasi harus tetap berjalan karena adanya hubungan saling membantu dan bekerjasama.

Lalu untuk kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah dan hukum yang ada, dengan adanya Program Wadul Bae seharusnya diberikannya anggaran khusus penanganan kekerasan dan mengatasi kekerasan pada anak. Melihat anggaran yang diberikan adalah hanya potongan anggaran 20% dari anggaran pendidikan, menurut peneliti kurang adanya keadilan dalam memberikan anggaran.

5. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemasaran Sosial Program Wadul Bae

Program-program sosialisasi dalam kegiatan Wadul Bae menurut sajian data menarik perhatian penulis. Pasalnya, dalam melaksanakan strategi pemasaran sosial Wadul Bae tidaklah mudah, karena banyaknya Warga Kota Cirebon yang acuh tak acuh kepada fenomena kekerasan membuat Tim Wadul Bae berusaha keras dari sulitnya membuat waga yang menjadi “melek” terhadap fenomena kekerasan.

Lalu, pada sajian data terlihat bahwa Tim Wadul Bae berinovasi membuat suatu taktik yang unik dan menarik menurut pandangan peneliti, sehingga muncul inovasi, taktik dengan cara yang unik yaitu menggandeng beberapa kemitraan, dan bergabung dengan beberapa program sosialisasi lain yang sebenarnya topik dalam sosialisasi gabungan tersebut terkadang sesuai dengan topik sosialisasi Wadul Bae, namun terkadang tidak sesuai. Ini adalah salah satu taktik yang unik dan inovasi baru untuk mengakali

agar dapat terus mengedukasi Warga Kota Cirebon dengan harapan warga sadar dengan indikasi-indikasi kekerasan dan berani melapor kasus-kasus kekerasan disekitarnya.

Nama “Wadul Bae” dalam program pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak ini berasal dari bahasa daerah Cirebon. Namun sangat disayangkan dalam programnya sendiri tidak ada unsur kegiatan khusus atau kegiatan tradisional khas Kota Cirebon. Wadul Bae hanya memberi nama program dengan mengusung kearifan lokal, namun tidak memasukan unsur lokal maupun nilai-nilai lokal kedalam program-program, seperti kegiatan tari jaipong, kegiatan membatik, atau kesenian-kesenian lain yang dapat menarik perhatian masyarakat Kota Cirebon, mungkin selain dapat menarik perhatian juga bisa melestarikan kegiatan lokal khas Kota Cirebon.

Misalnya pada program *Three Ends*, memang nama kegiatan tersebut diberikan dan di setujui oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia, dengan menamai kegiatan menggunakan bahasa asing. Namun menurut peneliti nama kegiatan tersebut sangat tidak sesuai dengan nama program Wadul Bae, karena Wadul Bae menamai dirinya dengan berbasis bahasa daerah Cirebon, seharusnya bisa diberikan nama sampingan atau nama tambahan disamping nama kegiatan *Three Ends* yang mana nama sampingan itu berbahasa daerah Kota Cirebon, agar masyarakat Kota Cirebon paham pada saat pertama kali mendengar kegiatan tersebut.

Kegiatan *Three Ends* itu kegiatan sosialisasi kepada anak-anak menggunakan lirik-lirik lagu atau *jingle* lagu. Namun lirik dari lagu atau

jingle yang dipakai oleh Wadul Bae menggunakan bahasa Indonesia. Menurut peneliti, memang program telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan bahasa asing, namun pemerintah pusat mempersilahkan agar *jingle* atau lagu tersebut di ciptaan oleh masing-masing daerahnya, disini menurut peneliti lebih baik Wadul Bae menciptakan *jingle* kegiatan *Three Ends* Kota Cirebon menggunakan bahasa Cirebon, selain menarik perhatian masyarakat Kota Cirebon juga bisa menjadi hal yang beda dan unik, berbeda dari daerah lain di Indonesia, dan tentunya bisa menjadi nilai tambahan untuk Wadul Bae mewakili Kota Cirebon.

Dalam ketidak konsisten kegiatan dan nama program, menurut peneliti seperti tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik antar bidang di DSPPPA dan kepengurusan Wadul Bae. Pasalnya, nama program yang jelas mengusung kearifan lokal saja jelas tidak sesuai dengan nama kegiatan yang berasal dari bahasa asing.

Lalu berbicara mengenai kegiatan, arsip data menjadi suatu hal yang penting untuk semua instansi, organisasi, dan lembaga sekalipun. Menyimpan sebuah arsip seharusnya menjadi sebuah kewajiban, untuk menyimpan data atau kegiatan yang mana untuk memudahkan para instansi bila membutuhkan data tersebut dikemudian hari. Namun sangat disayangkan bahwa Tim Wadul Bae, baik dari DSPPPA, P2TP2A dan PPT tidak membuat arsip khusus dokumentasi kegiatan program, terlihat dari penjelasan di sajian data. Dokumentasi di Wadul Bae masih sangat lemah,

tidak semua kegiatan terdokumentasi secara rapih dan merata. Sebaiknya untuk kebaikan program Wadul Bae kedepan, tidak hanya berfokus kepada pelayanan saja, namun juga harus tetap fokus pada dokumentasi atau mengarsipkan data setiap bulannya, dan setiap kegiatan menjadi suatu hal yang wajiib dilakukan.

Menjalin hubungan dengan media adalah menjadi salah satu hal penting lainnya yang harus tetap diperhatikan dalam membuat strategi pemasaran sosial, jika dilihat pada sajian data Wadul Bae memang mempunyai hubungan yang baik dan selalu terhubung dalam kegiatan bersama pihak media. Seperti kegiatan bersama televisi lokal Kota Cirebon sampai dengan Radio Nasional Indonesia. Pada informasi dalam sajian data terlihat bahwa Wadul Bae tidak jarang selalu diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam sebuah program. Menurut pendapat peneliti, topik yang menjadi pembahasan juga berbobot dan mempunyai nilai. Selain itu topik yang dibahas selalu mengaitkan isu kekerasan dengan fenomena yang sedang terjadi pada masanya, konten nya pun cukup menarik, kritis dan mengedukasi.

Setelah membahas kegiatan sosialisasi program Wadul Bae baik kegiatan sosialisasi secara langsung bersama warga maupun dengan media, untuk sampai kepada tahapan penanganan pastinya disosialisasikan terlebih dahulu terkait alur penanganan dari hulu maupun ke hilir, baik di Wadul Bae maupun PPT RSUD Gunung Jati, baik dalam bentuk infografis maupun brosur. Menurut pandangan peneliti, dalam infografis alur layanan yang

terdapat pada sajian data secara umum masih kurang dipahami jika melihat kepada masyarakat secara umum. Tidak semua orang paham dalam sekali melihat alur yang cukup panjang dan bercabang seperti itu, baik alur pelayanan Wadul Bae maupun PPT. Harus ada inovasi infografis baru yang lebih sederhana berserta penjelasan singkat mengenai alur pelayanan tersebut, melihat bahwa Warga Kota Cirebon acuh tak acuh dalam isu kekerasan, harus adanya gerakan untuk membuat sesuatu yang menarik perhatian dalam sekali melihat alur pelayanan tersebut.

6. Kegiatan Evaluasi Pada Program Wadul Bae

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan kegiatan pelaksanaan pemasaran sosial dalam suatu kampanye *Public Relations*, menurut Kotler & Roberto (1989:17-18) ada beberapa elemen yang menjadi tolak ukurnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Sasaran sosial yaitu para Warga Kota Cirebon yang dipercaya oleh DSPPPA dan pengurus program Wadul Bae dapat memberikan jawaban terhadap suatu masalah sosial atau kehidupan masyarakat, dengan adanya para kader-kader Wadul Bae ditiap RT dan RW. Pemilihan yang tepat dalam membuat kader-kader Wadul Bae ditiap RT dan RW daerah Kota Cirebon. Para kader dapat selalu memantau kejadian-kejadian ditiap daerahnya masing-masing, yang mana hal tersebut menjadi hal yang baik untuk perkembangan Program Wadul Bae.
- b. Para pengurus Wadul Bae sebagai agen perubahan mengadakan kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada kader-kader

Program Wadul Bae, dengan tujuan untuk menekan tingkat kekerasan di Kota Cirebon, terutama kekerasan seksual pada anak. Niat dan ketulusan hati para warga yang ingin membantu warga lain dalam menangani kasus kekerasan, dan melindungi warga dengan mengedukasi menjadi pilihan yang sangat mulia.

- c. Kelompok sasaran Wadul Bae dalam menargetkan sasarannya jelas sesuai dengan pengelompokan segmen. Pemilihan segmen beberapa diantaranya sudah cukup baik, dan sesuai dengan target sasaran.
- d. Saluran komunikasi yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada kelompok sasaran Program Wadul Bae dilakukan dengan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Pemilihan saluran komunikasi dalam mensosialisasikan kegiatan Wadul Bae dan mengedukasi sudah sangat baik. Pasalnya, hampir semua media pendekatan dipakai oleh Program Wadul Bae.
- e. Strategi perubahan, dalam Program Wadul Bae ada beberapa strategi pemasaran yang dilakukan untuk mengubah perilaku sosial masyarakat yang terlihat cukup signifikan yaitu program *Three Ends* dan program Maghrib Mengaji. Strategi tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan, namun kegigihan Tim Wadul Bae dalam mengubah perilaku sosial warga Kota Cirebon dengan inovasi-inovasi kegiatannya menjadi hal yang sangat positif untuk terus dilakukan.

Dalam pelaksanaan pemasaran sosial Program Wadul Bae adanya kegiatan evaluasi rutin, yang mana kegiatan tersebut dilakukan yaitu

sebulan satu kali untuk kepengurusan dan tiga bulan satu kali untuk para kader dan DSPPPA. Dalam hal tersebut, menurut pendapat peneliti waktu yang diatur tersebut sudah cukup jika dilakukan rutin. Namun konten dalam kegiatan evaluasi masih kurang karena, dalam data evaluasi pada sajian data menyatakan bahwa Tim Wadul Bae tidak membuat arsip terkait data kuantitatif perkembangan kekerasan yang berhasil ditangani sampai dengan selesai, ataupun kegagalan penanganan. Bahkan data sederhana seperti data kuantitatif terkait kunjungan pasien maupun keberhasilan program sosialisasi tidak ada. Memang kunjungan pasien ada datanya secara keseluruhan kurang waktu lima tahun terakhir, namun yang merekap data tersebut adalah PPT RSUD Gunung Jati, datanya pun hanya sebatas pengelompokan pasien saja, tidak dispesifikasikan pasien dan korban kekerasan seksual anak berapa banyak dan korban dewasa berapa banyaknya. Untuk kedepannya, menurut peneliti Program Wadul Bae harus memiliki arsip terkait program-program dan pelayanan dalam Wadul Bae, seperti dokumentasi kegiatan, data rekapan kuantitatif perbulan maupun pertahun. Data tersebut pasti akan menjadi hal yang penting di hari yang akan datang.

Kurangnya warga yang berani untuk melapor, dan ketidaktahuan lembaga kemitraannya sendiri terkait Program Wadul Bae, dapat disimpulkan bahwa Program yang sudah berjalan kurang lebih 13 tahun lamanya ini kurang mensosialisasikan secara merata keseluruh pada tiap daerah di Kota Cirebon, ditambah dengan kurangnya inovasi baru dalam

mensosialisasikan Program Wadul Bae. Mungkin dari tindakan warga yang kurang sadar terkait fenomena kekerasan, karena Wadul Bae kurang melakukan riset, seperti melakukan FGD dengan warga-warga Kota Cirebon atau perwakilan dari tokoh masyarakat terkait pelayanan apa yang ingin dilakukan, sosialisasi apa yang menarik dilakukan, hal apa yang membuat warga kurang terbuka terkait fenomena kekerasan dan hal apa yang menjadi acuan warga agar peduli.

Riset kecil-kecil yang dilakukan bisa membuahkan dampak yang besar yang dapat mengubah perilaku warga, yang mungkin dari tidak peduli jadi peduli, tidak berani melapor jadi berani, dan mungkin saja dari yang acuh tak acuh menjadi ingin bergabung keanggotaan Kader Wadul Bae. Keterbukaan lembaga untuk selalu mendengarkan pendapat dari warga menjadi hal terpenting dalam kesuksesan sebuah instansi maupun lembaga. Apalagi permasalahan yang ditangani adalah masalah sosial dari warga untuk warga sendiri. Banyak hal positif dari keterbukaan bersama warga, salah satunya warga dapat lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan.